

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Pendidikan Dasar Tingkat SMP di Kota Tasikmalaya. Judul tersebut dilatarbelakangi karena adanya ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat SMP di Kota Tasikmalaya serta sarana dan prasarana yang ada belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan, diantaranya yaitu terdapat beberapa sekolah di Kota Tasikmalaya masih kekurangan Ruang kelas, masih terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak, kapasitas maksimum ruang kelas belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan, beberapa SMP belum memiliki ruang laboratorium dan ruang perpustakaan dengan kondisi baik.

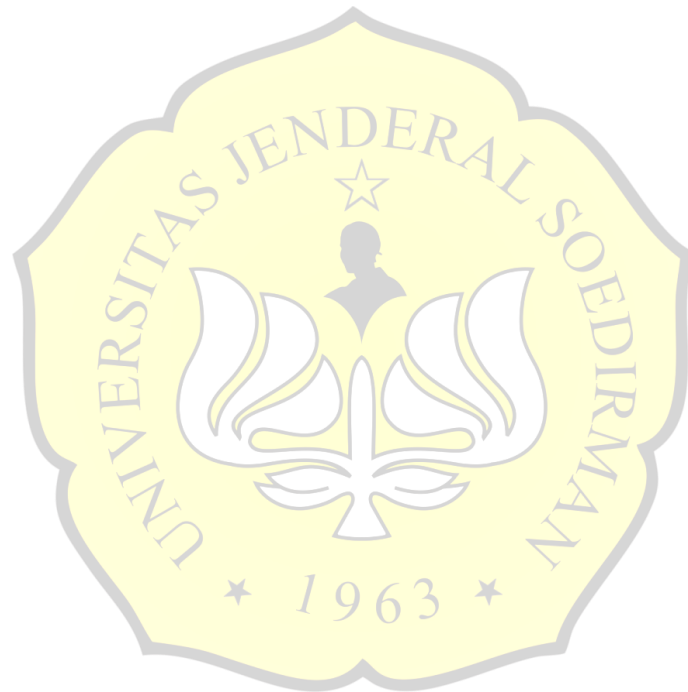
Selain itu ketidakmerataan kualitas pendidikan khususnya pada sarana dan prasarana pendidikan juga membuat stigma baru dikalangan masyarakat yaitu dengan adanya “lebel” mengenai adanya sekolah *favorite* dan sekolah tidak *favorite*. Sementara keberhasilan dari suatu pendidikan, dapat dinilai dari proses pendidikan salah satunya kegiatan belajar siswa. Kegiatan belajar siswa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana pendidikannya.

Tujuan dalam meneliti ini yaitu untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari Implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan khususnya pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya pada beberapa sekolah masih belum terpenuhi sesuai dengan standarnya, seperti ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium komputer, peralatan olah raga, peralatan laboratorium dan peralatan kesenian. Dalam mendukung ketercapaian dari tujuan implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan SMP di Kota Tasikmalaya perlu didukung dengan adanya ketersediaan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan baik dana dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, maupun dana dari APBN. Koordinasi antar aktor kebijakan dan monitoring secara berkala kepada sasaran kebijakan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan pada sarana dan prasarana pendidikan disekolah. Mekanisme pelaksanaan kebijakan yang berjalan dengan baik dikarenakan adanya komitmen dari aktor kebijakan dalam memastikan mekanisme pelaksanaan kebijakan sesuai dengan prosedurnya serta adanya sumber daya manusia yang berperan secara aktif dalam implementasi kebijakan dapat berpengaruh dalam ketercapaian tujuan kebijakan, Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu adanya pendidikan dan pengembangan lebih lanjut terkait

dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di tingkat SMP, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik oleh aktor kebijakan dan dapat menghasilkan output maupun outcome yang maksimal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan



SUMARRY

This research is entitled Implementation of Policy on Educational Facilities and Infrastructure Standards in Elementary Education at the Junior High School Level in Tasikmalaya City. The title is motivated by the inequality of educational facilities and infrastructure at the junior high school level in the City of Tasikmalaya and the existing facilities and infrastructure are not in accordance with the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 24 of 2007 concerning the standards of educational facilities and infrastructure, including that there are several schools in The city of Tasikmalaya still lacks classrooms, there are still classrooms in a damaged condition, the maximum capacity of classrooms is not in accordance with the standard of educational facilities and infrastructure, some junior high schools do not have laboratory rooms and library rooms in good condition.

The purpose of this study is to describe and determine the inhibiting and supporting factors of the implementation of standard policies for educational facilities and infrastructure in order to equalize the quality of education, especially in elementary education at the junior high school level in Tasikmalaya City. The research method used in this study is a qualitative method. Data collection was done by interview, observation and documentation. The data analysis method used is an interactive analysis model.

The results of the study show that the implementation of standard policies for educational facilities and infrastructure in elementary education at the junior high school level in Tasikmalaya City in several schools has not been fulfilled according to the standards, such as library rooms, science lab rooms, and computer laboratory rooms, sports equipment, laboratory equipment and art equipment. In supporting the achievement of the objectives of implementing the standard policy for junior high school education facilities and infrastructure in Tasikmalaya City, it needs to be supported by the availability of a budget allocated in accordance with the standard policy for educational facilities and infrastructure, both funds from the Tasikmalaya City APBD, West Java Provincial APBD, as well as funds from the APBN. Coordination between policy actors and regular monitoring of policy targets can minimize the occurrence of problems with educational facilities and infrastructure in schools. The policy implementation mechanism that goes well is due to the commitment of policy actors in ensuring the policy implementation mechanism is in accordance with the procedures and the presence of human resources who play an active role in policy implementation can affect the achievement of policy objectives. Therefore, to improve the quality of human resources, there is a need for further education and development related to the management of educational facilities and infrastructure at the junior high school level, so that the management of educational facilities and infrastructure can run well by policy actors and can produce maximum outputs and outcomes.

Keywords: Policy Implementation, Management, Educational Facilities and Infrastructure

